



SINERGITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

Wisam Ramdani¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
E-Mail: wisam.ramdani@student.unjani.ac.id

Abstrak

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan yang sangat minimal, yaitu dari 72,18 persen pada tahun 2020 menjadi 72,85 persen pada tahun 2024, meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik telah dilaksanakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sinergitas antaraktor penyelenggara dan pendukung pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah, yang ditinjau melalui aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, pemilih pemula, dan pemilih berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar kedua lembaga telah berjalan intens dan harmonis, namun belum terlembagakan secara formal. Kerja sama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bersama, tetapi belum diperkuat oleh instrumen kelembagaan yang mengikat. Koordinasi juga telah berlangsung, namun belum memiliki pola dan mekanisme yang terstandarisasi. Secara keseluruhan, sinergitas yang terbangun masih bersifat operasional-relasional dan berkontribusi pada stabilitas partisipasi pemilih, namun belum mampu mendorong peningkatan partisipasi secara signifikan.

Kata Kunci: Sinergitas, Partisipasi Pemilih, Pilkada, Kesbangpol, KPU

Abstract

Voter participation in the Bandung Regency Regional Head Elections showed a very minimal increase, from 72.18 percent in 2020 to 72.85 percent in 2024, despite various socialization and political education activities that had been carried out. This condition indicates a problem in the synergy between election organizers and supporters. This study aims to identify and analyze the extent of synergy between the Bandung

Regency National Unity and Politics Agency and the Bandung Regency General Election Commission in encouraging voter participation in regional head elections, reviewed through the aspects of communication, cooperation, and coordination. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants, including the Head of the Bandung Regency National Unity and Politics Agency, the Chair of the Bandung Regency General Election Commission, first-time voters, and regular voters. The results of the study indicate that communication between the two institutions has been intense and harmonious, although it has not been formally institutionalized. Cooperation has been carried out through various joint activities, but has not been strengthened by binding institutional instruments. Coordination has also taken place, but it does not yet have a standardized pattern and mechanism. Overall, the synergy that has been established remains operational and relational in nature, contributing to the stability of voter participation, but has not been able to significantly increase participation.

Keywords: Synergy, Voter Participation, Regional Elections, Kesbangpol, KPU

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam perspektif ilmu politik dipahami sebagai sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui mekanisme representasi dan partisipasi politik warga negara. Konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik bersumber dari kehendak publik yang diekspresikan secara formal melalui proses electoral (Wiranggani 2017). Di Indonesia, pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sekaligus menentukan legitimasi kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Landasan normatif pelaksanaan Pilkada secara demokratis tercermin dalam nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menekankan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan sebagai inti demokrasi Indonesia (Samosir, Tinambunan, dan Septiandry 2023). Secara konstitusional, Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung, yang dinilai mampu memberikan legitimasi politik yang lebih kuat karena menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam menentukan kepemimpinan daerah (Siboy 2022).

Dalam konteks demokrasi elektoral, tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan legitimasi proses demokrasi. Partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik masyarakat serta rasa memiliki terhadap proses dan hasil pemerintahan (Asgar 2023). Sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berimplikasi pada lemahnya legitimasi pemimpin terpilih, tetapi juga berpotensi melemahkan integritas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri (Hardiyanti dan Fawaidi 2025).

Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024 menjadi arena penting untuk mengamati dinamika partisipasi pemilih di tingkat lokal. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 2.664.172 jiwa dan diikuti oleh dua pasangan calon, Pilkada ini merefleksikan kontestasi politik yang signifikan di salah satu wilayah strategis Jawa Barat (KPU 2024). Namun demikian, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih hanya meningkat secara marginal dari 72,18% pada Pilkada 2020 menjadi 72,85% pada Pilkada 2024. Peningkatan yang kurang dari satu persen ini menunjukkan kondisi stagnasi dan masih berada jauh di bawah target partisipasi ideal yang ditetapkan KPU maupun Kesbangpol (Mubarokah dan Arief 2024).

Fenomena stagnasi tersebut menjadi paradoks mengingat masifnya upaya sosialisasi dan pendidikan politik yang telah dilakukan. KPU Kabupaten Bandung melaksanakan lebih dari 1.500 kegiatan sosialisasi Pilkada, sementara Kesbangpol juga aktif menyelenggarakan berbagai program pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda (Balebandung 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan partisipasi pemilih tidak semata terletak pada kuantitas kegiatan, melainkan pada efektivitas, kualitas, serta keselarasan antarprogram yang dijalankan oleh lembaga terkait.

Secara kelembagaan, KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan Pilkada. KPU berfungsi sebagai penyelenggara teknis Pemilu, sedangkan Kesbangpol berperan sebagai fasilitator pendidikan politik dan stabilisator politik daerah. Namun, dalam praktiknya, komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antara kedua institusi tersebut masih cenderung bersifat parsial

dan belum sepenuhnya terlembagakan secara sistematis. Kondisi ini berpotensi melemahkan sinergitas kelembagaan dalam mendorong partisipasi pemilih secara berkelanjutan.

Dalam perspektif konseptual, sinergitas dipahami sebagai kondisi ketika kerja bersama menghasilkan capaian yang lebih besar dibandingkan akumulasi kontribusi masing-masing aktor secara terpisah. Stephen R. Covey menegaskan bahwa sinergi merupakan bentuk kerja sama strategis yang dibangun atas dasar saling percaya, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif dibandingkan pendekatan individual atau sektoral (Covey 2015). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sinergitas antarlembaga tidak sekadar berarti pembagian tugas, melainkan integrasi tujuan, proses, dan sumber daya secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada sangat ditentukan oleh sejauh mana KPU dan Kesbangpol mampu membangun sinergitas yang substantif, bukan hanya bersifat administratif atau insidental.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antar lembaga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek/ objek penelitian, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model *statistic* yang digunakan. Pengutipan menggunakan *body-notes*. Manuskrip ditulis dengan kerapatan 1,5 spasi, huruf Bookman Old Style 12.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual dalam kondisi alamiah, khususnya terkait dinamika komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antarlembaga (Sugiyono 2022). Unit analisis penelitian ini adalah Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses Pilkada. Informan kunci terdiri atas Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung dan Ketua KPU Kabupaten Bandung, sedangkan informan pendukung meliputi pemilih pemula dan pemilih berkelanjutan untuk memperoleh perspektif masyarakat terhadap efektivitas sinergitas kelembagaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan kegiatan, serta data kepemiluan yang relevan guna memperkuat kedalaman dan keakuratan data melalui triangulasi (Sugiyono 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dibantu dengan perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengelolaan data, pengkodean, serta identifikasi tema secara sistematis melalui *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan audit proses penelitian untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

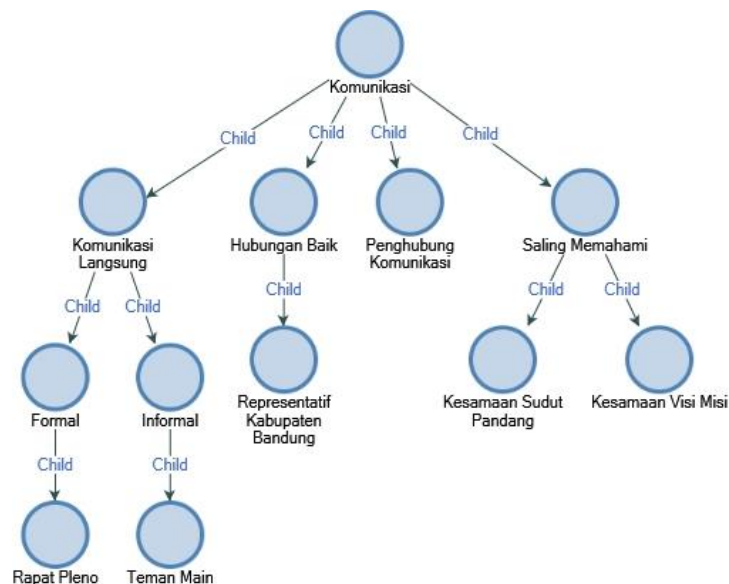
Pada pembahasan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisis temuan penelitian mengenai sinergitas antara Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama sinergitas, yaitu komunikasi, kerja sama, dan koordinasi, sebagai elemen kunci yang menentukan efektivitas kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka konseptual sinergitas serta konteks tata kelola pemerintahan daerah, guna menilai sejauh mana praktik sinergitas yang terbangun mampu menjawab permasalahan stagnasi partisipasi pemilih.

1. Dimensi Komunikasi

Hasil penelitian pada dimensi komunikasi diperoleh melalui analisis data kualitatif menggunakan aplikasi NVivo. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan dan divisualisasikan dalam bentuk *project map* untuk menggambarkan pola komunikasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Gambar 1. *Project Map* Komunikasi



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung berlangsung melalui dua pola

utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan melalui forum-forum resmi seperti rapat pleno, musyawarah, dan pertemuan kelembagaan yang membahas kebijakan serta penyelarasan tahapan Pilkada. Di sisi lain, komunikasi informal justru dinilai lebih dominan dan efektif dalam praktik, seperti melalui pertemuan nonkedinasan yang bersifat santai. Pola komunikasi informal ini menciptakan suasana yang lebih terbuka dan cair, sehingga memudahkan penyampaian gagasan, penyelesaian persoalan, serta memperkuat kedekatan personal antarpelaku kelembagaan.

Intensitas komunikasi antara kedua lembaga tergolong tinggi, terutama karena peran Kesbangpol sebagai penghubung koordinatif antara KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Posisi KPU sebagai lembaga independen di luar struktur perangkat daerah menjadikan Kesbangpol berfungsi sebagai jembatan komunikasi dalam relasi kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan komunikasi antara Kesbangpol dan KPU berlangsung secara berkelanjutan dan relatif harmonis, tanpa ditemukannya hambatan signifikan dalam memahami substansi kepemiluan maupun pembagian peran masing-masing lembaga.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesamaan perspektif antara Kesbangpol dan KPU terkait tujuan penyelenggaraan Pilkada, khususnya dalam mendorong partisipasi pemilih. Kesamaan cara pandang ini tercermin dari tidak ditemukannya perbedaan signifikan mengenai makna Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal serta peran masing-masing lembaga dalam pendidikan politik masyarakat. Dalam teori sinergitas Stephen R. Covey, kemampuan memahami perspektif pihak lain merupakan prasyarat utama terciptanya komunikasi sinergis, karena sinergi hanya dapat dibangun ketika aktor-aktor yang terlibat mampu menyelaraskan tujuan tanpa menghilangkan perbedaan peran (Covey 2015). Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Kesbangpol dan KPU telah memenuhi fondasi dasar sinergitas pada level pemahaman visi.

Selain kesamaan perspektif, komunikasi antarlembaga juga ditandai oleh kemampuan saling memahami kondisi dan perasaan masing-masing pihak. Pola komunikasi yang tidak sepenuhnya kaku secara birokratis

menciptakan ruang dialog yang empatik, sehingga setiap lembaga dapat menyampaikan kendala, keterbatasan, dan kebutuhan selama tahapan Pilkada. Covey menekankan bahwa komunikasi empatik merupakan inti dari sinergi karena memungkinkan pemahaman tidak hanya pada isi pesan, tetapi juga konteks emosional di baliknya. Dalam konteks ini, komunikasi empatik berkontribusi pada terbangunnya rasa saling percaya dan menjaga keharmonisan hubungan kerja antarlembaga.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun masih sangat bergantung pada relasi personal dan mekanisme informal. Pemahaman terhadap paradigma kerja masing-masing lembaga memang telah membantu mencegah tumpang tindih peran antara Kesbangpol dan KPU, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pelembagaan sistem komunikasi yang terstandar. Akibatnya, komunikasi yang efektif bersifat situasional dan sangat bergantung pada individu-individu tertentu, sehingga daya ikat strukturalnya relatif lemah.

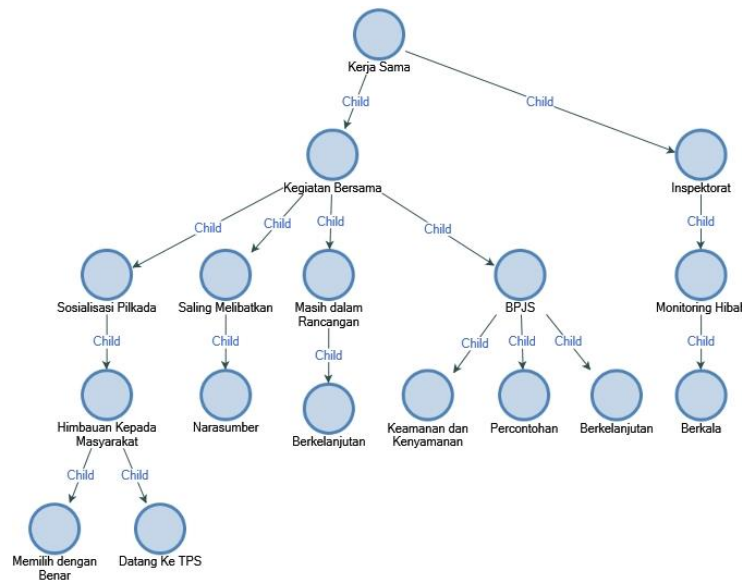
Dengan demikian, dimensi komunikasi dalam sinergitas Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung menunjukkan adanya fondasi relasional yang kuat, ditandai oleh kesamaan perspektif, komunikasi empatik, dan pemahaman terhadap paradigma kerja masing-masing lembaga. Namun, komunikasi tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi hubungan kerja daripada sebagai kekuatan strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Implikasinya, komunikasi antarlembaga mampu menjaga partisipasi pemilih tetap stabil pada Pilkada 2024, tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan lonjakan partisipasi yang signifikan karena belum diarahkan secara sistematis sebagai strategi komunikasi publik yang terintegrasi.

2. Dimensi Komunikasi

Hasil penelitian pada dimensi kerja sama diperoleh melalui analisis data kualitatif menggunakan aplikasi NVivo. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kerja sama antara Badan Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung, yang selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk *project map* sebagai dasar

analisis hubungan kolaboratif antarlembaga dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Gambar 2. *Project Map* Kerja sama



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Badan Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan bersama, terutama dalam bentuk sosialisasi Pilkada dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kedua lembaga saling melibatkan diri sebagai narasumber dan fasilitator, baik pada kegiatan yang diinisiasi oleh KPU maupun oleh Bakesbangpol. Pola ini menunjukkan bahwa kerja sama telah terbangun secara operasional dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelancaran tahapan Pilkada 2024.

Dalam perspektif sinergitas, Stephen R. Covey menegaskan bahwa kerja sama yang efektif tidak hanya ditandai oleh keberadaan aktivitas bersama, tetapi oleh kemampuan aktor untuk mengintegrasikan peran dan sumber daya guna menghasilkan nilai tambah. Sinergi memungkinkan perbedaan peran dan kewenangan dilebur ke dalam tujuan bersama sehingga kolaborasi tidak berhenti pada pembagian tugas, melainkan pada penciptaan hasil yang lebih optimal dibandingkan kerja secara terpisah.

Berdasarkan analisis peneliti, kerja sama programatik yang dilakukan oleh Bakesbangpol dan KPU masih berada pada level fungsional. Kegiatan

sosialisasi yang dijalankan secara kolaboratif berkontribusi dalam menjaga kesinambungan pendidikan politik, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang untuk menciptakan pendekatan baru yang inovatif. Dengan demikian, kerja sama lebih berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan partisipasi pemilih dibandingkan sebagai instrumen akselerasi peningkatan partisipasi.

Temuan lain memperlihatkan adanya bentuk kerja sama yang menghasilkan solusi konkret melalui keterlibatan pemerintah daerah, khususnya dalam pengcoveran BPJS bagi petugas KPU hingga tingkat bawah. Dukungan ini memberikan jaminan rasa aman bagi penyelenggara pemilu dan memperkuat kapasitas operasional KPU dalam menjalankan tahapan Pilkada. Solusi tersebut dipandang sebagai praktik kolaboratif yang mampu menjawab kebutuhan teknis penyelenggaraan pemilu.

Menurut (Covey 2015), sinergi yang ideal melahirkan solusi pihak ketiga, yakni solusi yang tidak sepenuhnya berasal dari satu aktor, tetapi merupakan hasil integrasi kepentingan dan sumber daya bersama. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah daerah melalui Bakesbangpol mencerminkan munculnya solusi sinergis yang melampaui kapasitas individual KPU dan menunjukkan potensi kerja sama antarlembaga dalam menghasilkan nilai tambah yang signifikan.

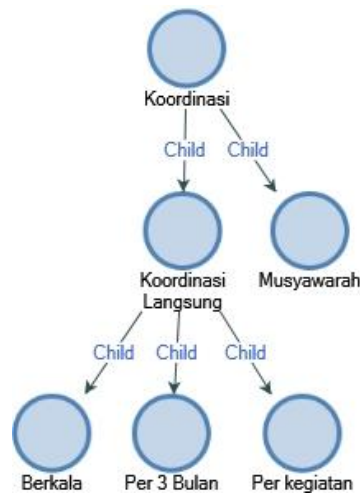
Namun demikian, analisis peneliti menunjukkan bahwa solusi yang dihasilkan melalui kerja sama tersebut masih bersifat situasional dan belum dilembagakan dalam kerangka kerja jangka panjang. Ketidadaan instrumen formal seperti Nota Kesepahaman (MoU) menyebabkan kerja sama sangat bergantung pada dinamika hubungan personal dan kebutuhan sesaat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sinergitas pada dimensi kerja sama belum berkembang menjadi instrumen strategis yang secara sistematis diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, melainkan masih berfungsi sebagai penyangga operasional dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. Dimensi Koordinasi

Pada dimensi koordinasi selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk *project map* untuk memperlihatkan pola hubungan, jalur koordinasi, serta

keterlibatan aktor dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Visualisasi ini membantu memperjelas keterkaitan antar aspek koordinasi yang teridentifikasi dari hasil reduksi dan pengelompokan data.

Gambar 3. *Project Map* Koordinasi



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan Kesbangpol dan KPU Kabupaten Bandung dilakukan melalui berbagai forum, terutama musyawarah dan rapat pleno, yang digunakan sebagai sarana penyamaan langkah dalam pengambilan keputusan. Melalui forum tersebut, kedua lembaga berupaya menyelaraskan pelaksanaan program sosialisasi, pendidikan politik, serta kegiatan pendukung Pilkada 2024 agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun aktivitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa koordinasi telah menjadi mekanisme penting dalam menjaga keteraturan proses penyelenggaraan Pilkada.

Dalam praktiknya, koordinasi juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan pemanfaatan sumber daya antar lembaga. KPU berfokus pada aspek teknis pemilihan, sementara Bakesbangpol berperan dalam mengintegrasikan dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk fasilitasi kegiatan maupun dukungan administratif. Pola ini menunjukkan bahwa koordinasi berfungsi sebagai penghubung antara komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun sebelumnya, sehingga memungkinkan setiap lembaga menjalankan perannya secara saling melengkapi.

Menurut Stephen R. Covey, koordinasi merupakan elemen integratif dalam sinergitas yang memastikan bahwa komunikasi dan kerja sama bergerak menuju tujuan yang sama. Sinergi tidak akan tercapai apabila setiap aktor bekerja secara terpisah tanpa adanya penyesuaian upaya dan pengelolaan sumber daya yang terkoordinasi. Dalam kerangka ini, koordinasi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan kekuatan masing-masing aktor agar menghasilkan dampak kolektif yang lebih besar.

Namun demikian, temuan empiris menunjukkan adanya inkonsistensi informasi antara Bakesbangpol dan KPU terkait pola dan frekuensi koordinasi. Bakesbangpol menyatakan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, sementara KPU memandang koordinasi bersifat fleksibel dan dapat berlangsung beberapa kali dalam satu bulan sesuai kebutuhan kegiatan. Selain itu, keberadaan lebih dari satu jalur koordinasi antarlembaga membuka potensi perbedaan pemahaman dan ketidaksinkronan informasi antar aktor.

Berdasarkan analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun masih bersifat situasional dan belum terstandarisasi. Koordinasi lebih berfungsi sebagai mekanisme pengendalian proses untuk menjaga kelancaran tahapan Pilkada, bukan sebagai instrumen perencanaan strategis jangka panjang. Ketergantungan pada interpretasi dan inisiatif aktor individu membuat koordinasi rentan terhadap inkonsistensi dan membatasi optimalisasi sinergitas antarlembaga.

Lebih lanjut, koordinasi yang bersifat operasional ini berdampak pada terbatasnya kontribusi koordinasi terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Koordinasi mampu menjaga stabilitas dan keteraturan penyelenggaraan Pilkada, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan komunikasi publik dan kerja sama programatik ke dalam satu strategi terpadu yang berorientasi pada akselerasi partisipasi pemilih. Dengan demikian, sinergitas pada dimensi koordinasi masih berperan sebagai penyangga institusional, belum sebagai penggerak utama peningkatan kualitas partisipasi demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 telah terbangun melalui komunikasi yang intens, kerja sama yang saling melengkapi, serta koordinasi yang menjaga keteraturan proses penyelenggaraan. Pada dimensi komunikasi, kesamaan perspektif, pemahaman emosional, dan pengakuan terhadap perbedaan paradigma kerja menjadi fondasi relasional yang memperkuat hubungan antarlembaga. Pada dimensi kerja sama, sinergitas terwujud dalam pelaksanaan program bersama dan dukungan sumber daya yang mampu menjamin kelancaran tahapan Pilkada. Sementara itu, koordinasi berperan sebagai mekanisme penyalarsan aktivitas dan pengendalian proses agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Namun demikian, sinergitas yang terbangun masih didominasi oleh pendekatan operasional dan relasional, serta belum sepenuhnya dilembagakan dalam kerangka strategis yang terstruktur. Akibatnya, sinergitas tersebut lebih berfungsi dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada daripada mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asgar, S. 2023. "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3: 5982–94. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2802%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2802/1996>.
- Balebandung. 2024. "KPU Kab Bandung: Tingkat Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024 Meningkat." *balebandung.com*. <https://www.balebandung.com/kpu-kab-bandung-tingkat-partisipasi-masyarakat-di-pilkada-2024-meningkat> (September 23, 2025).
- Covey, Stephen R. 2015. *The 7 Habits of Highly Effective People*. 30th Anniv. ed. Decky Surjowidjojo. Jakarta: Dunamis Publishing.
- Hardiyanti, Nila Yani, dan Ach. Fawaidi. 2025. "Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Dan Ancaman Terhadap Demokrasi." *Dirosat* :

Journal of Islamic Studies 10(1): 37.

KPU. 2024. "Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024." *kab-bandung.kpu.go.id*. <https://kab-bandung.kpu.go.id/blog/read/penetapan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-bandung-tahun-2024>.

Mubarokah, M. Elgana, dan Teuku Muhammad Valdy Arief. 2024. "Partisipasi Pilkada Kabupaten Bandung Stagnan, KPU Sebut Cuaca Jadi Kendala." *kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/05/112000178/partisipasi-pilkada-kabupaten-bandung-stagnan-kpu-sebut-cuaca-jadi-kendala> (September 23, 2025).

Samosir, Osbin, Laurentius Tinambunan, dan Robertus Septiandry. 2023. "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila." In *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, LPPM Universitas Katolik Santo Thomas, 53–63.

Siboy, Ahmad. 2022. *Pengantar Hukum Pilkada*. 1 ed. ed. Rara Aisyah Rusdian. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2 ed. Bandung: Alfabeta.

Wiranggani, Panjalu. 2017. *Demokrasi*. 2017 ed. ed. Abd Kholiq. Yogyakarta: Relasi Inti Media.